



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI BLITAR**

**KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR**

**NOMOR : KEP-23/M.5.22/Cr.3/06/2024**

**TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BLITAR**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Blitar tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BLITAR TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Blitar Tahun 2024.



- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self asesment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Blitar;
  2. Hasil *Self asesment* Kejaksaan Negeri Blitar disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 12 Juni 2024  
Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR,



**Dr. MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.M.H**  
Jaksa Madya Nip. 19850314 200812 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Timur
7. Arsip



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan  
Negeri Blitar  
Nomor : KEP-23/M.5.22 /Cr.3/06/2024  
Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	<b>AGUS KURNIAWAN, S.H.M.H</b> Jaksa Utama Pratama (IV/b) Nip. 19690809 199503 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	Ketua
2	<b>ROHMADI, S.H.M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19770908 200312 1 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	<b>PRABOWO SAPUTRO, S.H.M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19771001 200312 1 002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	<b>WAHYU SUSANTO, S.H.M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19830510 200703 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	<b>AGUNG WIBOWO, S.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19720829 199603 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	<b>SYAHRIR SAGIR, S.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19721025 199803 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	<b>Dr. MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.M.H</b> Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19850314 200812 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BLITAR,



**Dr. MARTIN EKO PRIYANTO, S.H.M.H**  
Jaksa Madya Nip. 19850314 200812 1 001

